12745

by 12745 -37946

Submission date: 04-Dec-2020 07:57PM (UTC+0700)

Submission ID: 1464560710

File name: 12745-37946-2-SM.doc (173K)

Word count: 8704

Character count: 59403

Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dalam Upaya Mewujudkan Konsep *Green Legislation* di Indonesia

Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.H.¹, Bitu Gadsia Spaltani, S.H., M.H.²

ABSTRAK

Lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam mewujudkan *green legislation* melalui putusan hakim yang mengedepankan keadilan manusia dan lingkungan hidup. Namun selama ini ternyata lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup masih berorientasi pada hukum formal, sehingga putusan hakim yang dibuat belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan konsep *green legislation* di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Analisis data dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan pembahasan dapat akurat menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: **pertama**; sertifikasi hakim lingkungan hidup penting dilakukan dalam upaya penerapan *green legislation* di Indonesia didasarkan pada empat pertimbangan, yaitu: dalam rangka perwujudan UUD RI Tahun 1945 sebagai *green constitution*, peran strategis putusan hakim dalam mewujudkan keadilan manusia dan lingkungan hidup, memiliki kontribusi bagi efektivitas penegakan hukum lingkungan, serta untuk keterpaduan pelaksanaan kekuasaan yudikatif atau kehakiman dalam prinsip trias politica. **Kedua**, bahwa berkaitan dengan penerapan sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan *green legislation*, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan sebagai tonggak pembangunan sistem sertifikasi hakim lingkungan dalam menangani perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di bidang lingkungan hidup. Sekaligus setiap tahun dilakukan pelatihan dan pembinaan hakim agar kebutuhan jumlah hakim lingkungan hidup yang telah bersertifikasi terpenuhi di setiap wilayah. **Ketiga**, bahwa arah pembaruan hukum yang berkaitan dengan ketentuan sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan *green legislation* dapat dilakukan melalui pengawalan kebijakan sertifikasi hakim lingkungan hidup dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak; menambah kapabilitas hakim dalam bidang keilmuan lingkungan hidup; serta penguatan paradigma berpikir hakim agar pro-lingkungan atau pro-natura (*green thinking*) sebagai bentuk perwujudan norma hukum lingkungan menurut *green constitution* maupun *green legislation* di Indonesia.

Keywords: hakim, sertifikasi lingkungan hidup, *green legislation*.

ABSTRACT

Judicial institutions have a strategic role in realizing green legislation through judge's decisions that are fair to humans and the environment. However, it turns out that in resolving environmental disputes, court institutions are still oriented towards formal law. The judge's

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

82
 decision has not fully reflected the expected justice. The purpose of this research is to find out, analyze, and explain the certification of environmental judges in an effort to realize the concept of green legislation in Indonesia. This research is a normative or doctrinal legal research. Data analysis was carried out in a qualitative way, hoped that the discussion can accurately answer the problem formulation. This research resulted in three conclusions. First, it is important that environmental judge certification be carried out in an effort to realize green legislation in Indonesia based on four considerations, namely: in the framework of realizing the 1945 Indonesian Constitution as a green constitution; the strategic role of judge's decision in realizing justice for humans and the environment; has a contribution to the effectiveness of environmental law enforcement; as well as for integrated implementation of judicial power in the principles of trias politica. Second. In the application of environmental judge certification in an effort to realize green legislation, the government has issued a decision of the chairman of the Supreme Court of Republic of Indonesia number 134/KMA/SK/IX/2011 concerning environmental judge certification, as the foundation for the development of a certification system for environmental judges in handling civil, criminal and state administrative cases in the environmental sector. Apart from that, judges training and coaching are also carried out every year so that the number of judges who have environmental certification can be fulfilled. Third, the direction of legal reforms related to the provisions of environmental judges certification in an effort to realize green legislation can be carried out through the monitoring of the by environmental judge certification policy by cooperating with various parties; increase the capability of judges in the field of environmental science; as well as strengthening the paradigm of judges thinking so that it is environmentally oriented and green thinking as a form of manifestation of environmental legal norms according to green constitution and green legislation in Indonesia.

Keywords: judge, environmental certification, green legislation.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

55
 Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) bukan kekuasaan (24
Machtsstaats) tertera jelas dalam konstitusi negara. Sebagaimana termaktub dalam alenia keempat Pembukaan UUD Tahun 1945, diperlukan sarana hukum untuk mencapai tujuan negara. Dua pasal dalam UUD Tahun 1945, yakni Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia dapat dinyatakan sebagai konstitusi hijau atau *green constitution*. Konstitusi hijau merupakan tanggung jawab penuh negara dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan bagi manusia dan lingkungan.

Meskipun konstitusi Indonesia dikatakan cukup “hijau”, namun dalam konteks implementasi tidak mudah “menghijaukan” peraturan perundang-undangan di bawah UUD Tahun 1945. Upaya penuh perjuangan untuk dapat “menghijaukan” pola pikir dan pola tindak

1

dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang mengedepankan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Terbukti bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih jauh dari harapan. Banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang bermuara pada tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi manusia dan lingkungan hidup.

Dominasi manusia terhadap lingkungan hidup yang menyebabkan degradasi kelestarian fungsi lingkungan hidup tidak terlepas dari paham antroposentrisme yang telah mengakar kuat. Sebagian kalangan bahkan ada yang menilai bahwa paham antroposentrisme sebagai biang keladi akar penyebab kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah.³ Etika antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta, hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan isinya sekedar alat pemuas kepentingan dan kebutuhan manusia.⁴ Menurut Arne Naess, krisis lingkungan hidup hanya bisa diatasi dengan melaksanakan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal.⁵

Kerusakan lingkungan hidup akibat perilaku manusia secara eksplisit tertuang dalam Al Quran. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman, “Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar” (QS Ar-Ruum: 41). Menurut Islam, alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan Islam adalah tanda “keberadaan” Allah dan memberi jalan bagi manusia untuk mengetahui keberadaan-Nya. Allah berfirman dalam Surat Adz-Dzariyat: 20, “Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin”.

Dalam Al Quran banyak ditemukan pembahasan mengenai alam yang dilanjutkan dengan anjuran untuk berpikir, memahami, mengingat, bersyukur, dan bertafakur, yang akan mengantarkan manusia pada sesuatu yang Maha Mutlak. Alam adalah tanda-tanda keberadaan Allah, karena alam dipandang sebagai manifestasi seluruh nama dan sifat-sifat Illahi. Merusak alam berarti merusak “wajah” atau tanda Allah di muka bumi. Manusia diwajibkan untuk

³ Nadjamuddin Ramly, 2007, *Islam Ramah Lingkungan, Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, pemeliharaan, dan Penyelamatan Lingkungan Hidup*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta Selatan, hlm 23.

⁴ Sony Keraf, 2006, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, hlm. xv.

⁵ *Ibid.*, hlm. viv.

memperlakukan alam dengan baik, karena alam adalah tangga untuk merenungi kemahakuasaan Allah yang mengantarkan menjadi orang-orang yang bertaqwa⁶.

Begitu pentingnya alam bagi keberadaan manusia, maka upaya menjaga alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup harus ditempatkan menjadi tujuan penting dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Salah satu alat yang kuat dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penegakan hukum, terutama penerapan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dikaitkan dengan UUDN Tahun 1945 sebagai konstitusi hijau, maka dalam perwujudannya diperlukan dukungan dari semua lembaga terkait, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Konteks konstitusi hijau atau *green konstitusi* tidak terlepas dari konsep *green legislation*. Lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam mewujudkan *green legislation* melalui putusan-putusan hakim yang mengedepankan keadilan manusia dan alam pada sengketa lingkungan hidup yang masuk di ranah pengadilan. Putusan hakim yang bernuasa “hijau” dipandang mampu memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Namun demikian, selama ini ternyata lembaga peradilan dalam melakukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan. Berbagai kasus sengketa lingkungan yang diajukan ke pengadilan, keputusannya sangat mengecewakan rasa keadilan. Lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup masih berorientasi pada hukum formal. Hakim kurang melihat pada pertimbangan hukum lainnya yang terdapat dalam asas hukum yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷ Padahal asas dan prinsip-prinsip tersebut sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan hukum dalam perkara yang tidak terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Hakim juga dipandang belum sepenuhnya melihat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga keputusan yang dibuat belum mencerminkan rasa keadilan. Kegagalan lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan karena aparat penegak hukum terutama hakim dalam

⁶ Nadjamuddin Ramly, *op.cit.*, hlm. 26.

⁷ Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 172.

1

11 memahami dan menerapkan hukum baru sebatas menggunakan logika peraturan dan prosedur yang bersifat legal formal.⁸

14 Menanggapi masih lemahnya pemahaman hakim dalam memutus sengketa lingkungan hidup, sebenarnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan mengenai sertifikasi hakim lingkungan hidup melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011.⁵ Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung tersebut, maka perkara lingkungan hidup harus ditangani oleh hakim yang bersertifikasi lingkungan hidup.⁹⁶

Meskipun program sertifikasi hakim lingkungan hidup telah berjalan selama sembilan tahun, sejak tahun 2011, namun ketentuan tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Sampai saat ini ketercukupan jumlah hakim yang telah bersertifikasi lingkungan dipandang belum memadai. Diperkirakan dari delapan ribuan jumlah hakim di Indonesia, baru sekitar lima sampai sepuluh persen yang telah bersertifikasi hakim lingkungan hidup. Upaya melalui putusan hakim yang berkeadilan bagi manusia dan lingkungan hidup dalam rangka *green legislation* masih jauh dari harapan. Padahal melalui putusan hakim yang berkeadilan bagi manusia dan lingkungan hidup diharapkan mampu memberikan kontribusi penting terhadap terselenggaranya konsep *green legislation* di Indonesia.⁷⁰

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa sertifikasi hakim lingkungan hidup penting dalam upaya mewujudkan konsep *green legislation* di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan konsep *green legislation* di Indonesia?
- c. Bagaimana seharusnya sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan konsep *green legislation* di Indonesia?

⁸ *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji asas hukum, norma atau kaidah dan seperangkat pengaturan yang terkait dengan sertifikasi hakim lingkungan hidup dan konsep *green legislation* di Indonesia. Berdasarkan sasaran penelitian tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau doktrinal. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁹ Sementara menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari kepustakaan berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka atau dokumentasi dan inventarisasi. Studi pustaka/dokumen dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis dan mengkaji peraturan yang terkait dengan sertifikasi hakim lingkungan hidup, *green constitution* dan *green legislation*. Penelusuran kepustakaan dilakukan baik secara manual maupun melalui media elektronik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dalam Upaya Mewujudkan Konsep *Green Legislation* di Indonesia

Sertifikasi hakim lingkungan hidup merupakan hal yang penting dalam upaya mewujudkan konsep *green legislation* di Indonesia didasarkan pada empat pertimbangan yang mendasar, yakni:

a. Perwujudan UUDN RI Tahun 1945 sebagai *Green Constitution*

Mencermati pengaturan dalam UUD RI Tahun 1945 dapat dikatakan bahwa konstitusi Indonesia telah “bernuansa hijau”. Pada konteks tersebut, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) merupakan bukti dan layak disematkan sebagai *green constitution* atau konstitusi hijau. Pasal 28H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

⁹ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.” Sementara Pasal 33 ayat (4) berbunyi, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Dua Pasal tersebut menegaskan nuansa hijau UUD RI Tahun 1945 melalui hak lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai HAM dan pengadopsian prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Meskipun dalam tataran realitas, penegasan tentang nuansa hijau UUD RI Tahun 1945 tersebut tidak banyak pihak yang menyadarinya.¹¹

UUD RI Tahun 1945 adalah konstitusi dalam konteks sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, oleh karenanya konstitusionalisme produk peraturan perundang-undangan diuji berdasarkan UUD RI Tahun 1945 yang mengandung asas dan kaidah penyelenggaraan negara.¹² Korelasinya dengan pengakuan UUD RI Tahun 1945 sebagai *green constitution* atau konstitusi hijau akan memberikan implikasi logis pada penguatan kebijakan lingkungan hidup ke dalam produk peraturan perundang-undangan, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan *green legislation*. Artinya bahwa antara *green constitution* dengan *green legislation* memiliki keterikatan yang sangat kuat. Apabila sebuah konstitusi dikatakan sebagai *green constitution*, maka melekat kewajiban untuk menuangkan kebijakan lingkungan hidup dalam produk peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD RI Tahun 1945 (*green legislation*). Berkaitan dengan produk peraturan perundang-undangan dimaksud, Indonesia telah memiliki UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPPLH sebagai UU Payung atau *umbrella act* di bidang lingkungan hidup. Sebagai *umbrella act*, maka UUPPLH menjadi acuan dan pedoman bagi pengaturan UU lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Produk peraturan perundang-undangan lainnya di bidang lingkungan hidup harus harmonis dengan UUPPLH dan tidak diperkenankan bertentangan dalam pengaturannya. Terlebih lagi menilik keberadaan Indonesia sebagai negara yang sarat akan kekayaan sumber daya alam sekaligus memuat potensi kebencanaan yang tinggi. Karena perlakuan terhadap alam dan lingkungan hidup perlu senantiasa memerhatikan daya dukung

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2016, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 8-9.

¹² Titon Slamet Kurnia, 2012, *Konstitusi HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 2.

lingkungan hidup untuk tetap lestari dan berkelanjutan. Sebagaimana konsep pembangunan berkelanjutan yang telah dijadikan paradigma pembangunan di Indonesia, meskipun dalam tataran implementasinya bukanlah persoalan yang mudah. Banyak faktor dan hambatan yang memberikan kontribusi besar untuk terselenggaranya pembangunan yang memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan. Salah satu diantaranya adalah keberadaan manusia dengan segala perilakunya dalam memposisikan lingkungan hidup sebagai modal dasar pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Imbas dari tekanan terhadap lingkungan hidup memunculkan beraneka ragam persoalan lingkungan hidup, mulai dari pencemaran, kerusakan, dan tidak terpenuhinya keadilan bagi lingkungan hidup.

Berbagai produk perundang-undangan di ranah lingkungan hidup telah berhasil ditetapkan oleh pemerintah, dan dapat dijadikan pedoman dalam setiap gerak dan langkah pembangunan yang dilakukan, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun badan usaha. Namun demikian, semua produk perundang-undangan di bidang lingkungan hidup tersebut dipandang belum mencukupi untuk memaksa para penentu kebijakan untuk tunduk dan mematuhi. Persoalan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup sering kali masih diposisikan tidak cukup penting dan strategis dibandingkan dengan sektor lain yang lebih terukur dalam sisi keuntungan dan *benefit* langsung bagi kebutuhan hidup manusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembahasan *green legislation* tentulah sangat kompleks, bukan hanya pada substansi materi yang diatur, namun berkaitan juga dengan bagaimana sebuah produk perundang-undang di bidang lingkungan hidup dibentuk dan dilaksanakan. Di Indonesia, pembagian atau pemisahan kekuasaan yang dibedakan menjadi tiga, meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif bukan tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Doktrin pemisahan kekuasaan¹³ ini, dalam bentuk pernyataannya yang paling sederhana berarti bahwa tiap-tiap proses pemerintahan diyakini menjadi institusi pemerintahan yang tidak terpisahkan, tidak boleh tumpang tindih dalam hal fungsi maupun pelaksanaannya. Lebih lanjut artinya bahwa ketiga bentuk pembagian kekuasaan yang dikenal dengan konsep trias politika menuntut adanya pembagian kewenangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ranah bidang masing-masing, sekaligus tentu mengedepankan prinsip keterpaduan secara harmonis antar bentuk kekuasaan. Pelaksanaan ketentuan produk

¹³ K. C. Wheare, 2019, *Konstitusi-konstitusi Modern*, Nusa Media, Bandung, hlm. 38.

1

105
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup oleh kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman memberikan kontribusi besar dalam implementasi perspektif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945. Atau dengan kata lain, bahwa lembaga peradilan melalui putusan hakim yang berkeadilan lingkungan hidup merupakan bagian implementasi *green legislation* yang bersumber dari norma dasar UUD RI Tahun 1945 sebagai sebuah *green constitution* atau konstitusi hijau.

b. Peran Strategis Putusan Hakim dalam mewujudkan Keadilan bagi Manusia dan Lingkungan Hidup

Keberadaan aparaturnya penegak hukum merupakan aspek penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Bahkan bisa disebut memiliki peran kunci bagi upaya perwujudan keadilan dalam praktek kehidupan masyarakat, terutama dikaitkan dengan peran seorang hakim dalam lembaga peradilan. Hakim merupakan profesi yang strategis di lingkungan peradilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim merupakan pejabat peradilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim mempunyai peran penting dalam mewujudkan keadilan atas perkara yang dilimpahkan kepadanya. Peran penting seorang hakim turut menunjukkan bahwa sebuah putusan pengadilan sebagai produk hukum hakim memiliki posisi penting dalam mekanisme penegakan hukum yang berkeadilan. Secara logis, dapat disimpulkan bahwa hakim merupakan ujung tombak konkretisasi keadilan melalui putusan yang dibuat dan sangat menentukan keberhasilan sekaligus kegagalan proses penegakan hukum.

Pengadilan diposisikan sebagai jalur terakhir dari para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara hukum. Tentu ungkapan penuh makna tersebut bukanlah berlebihan. Lembaga pengadilan merupakan tumpuan harapan masyarakat yang berperkara, ketika suatu persoalan di ranah hukum tidak menemui jalan penyelesaian. Mencermati pentingnya kedudukan lembaga peradilan sudah seharusnya lembaga peradilan mampu memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada warga masyarakat dengan mengedepankan asas-asas hukum dalam memenuhi rasa keadilan. Lembaga peradilan yang mampu secara profesional menjalankan fungsi dan kewajibannya akan meningkatkan citra lembaga peradilan sebagai lembaga yang dapat dipercaya. Menegakkan hukum dan keadilan tanpa tebang pilih, hukum haruslah tajam ke atas dan kebawah, serta mengutamakan *equality before the law* bagi setiap

orang tanpa terkecuali. Idealnya bahwa kinerja lembaga peradilan dan hakim sebagai corong keadilan harus senantiasa mengedepankan independensi, bebas tidak memihak terhadap kemungkinan intervensi yang diterima.

Sebagai penguatan hal tersebut didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian pengadilan. Sementara dalam pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pengaturan dalam pasal tersebut, menekankan bahwa dalam menjalankan fungsinya di pengadilan, maka seorang hakim harus mandiri, bebas dari tekanan apapun. Keputusan yang dibuat harus didasarkan pada keutamaan hati nurani hakim dan kebenaran yang terungkap dalam persidangan.

Independensi hakim merupakan senjata utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi hakim agar menghasilkan putusan yang adil. Sejalan dengan hal tersebut, menyeter pendapat Franz Magnis Susesno, bahwa kebebasan hakim mengandung pemahaman bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak boleh terikat dan tertekan oleh siapapun, harus leluasa dalam menjalankan profesinya dengan professional. Pemaknaan kebebasan semacam ini diartikan sebagai kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.¹⁴ Independensi atau kebebasan hakim menjadi perbincangan yang selalu menarik untuk dibahas dan dikritisi, karena hal tersebut berkaitan dengan produk putusan yang dihasilkan hakim. Memang tidak sepenuhnya dapat memverifikasi kualitas putusan yang dihasilkan, namun bisa digunakan sebagai indikator. Hakim yang diberikan independensi dalam menjalankan tugasnya memiliki keleluasaan dalam melakukan proses penemuan hukum terhadap kasus yang diberikan. Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁵, bahwa penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Tergambar jelas, adanya hubungan yang kuat antara independensi hakim dengan penemuan hukum yang dilakukan hakim untuk merumuskan kebenaran sebagai dasar dari putusan hakim.

¹⁴ Disampaikan oleh Franz Magnis suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta, Pustaka Filsafat, 1987, hlm 33 sebagaimana dikutip Firman Floranta Adonara, Prinsip kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015, hlm. 222.

¹⁵ Sudikno Mertokusuko, 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 142.

1

Nilai keadilan yang diperjuangkan oleh hakim dalam pertimbangan memutuskan suatu perkara bukan saja ditujukan bagi manusia atau dalam hal ini kepentingan dan hak warga negara. Apabila dikaitkan dengan perkara perbuatan melanggar atau melawan hukum di bidang lingkungan hidup, maka konteks keadilan yang harus dipenuhi oleh hakim juga harus terhubung dengan substansi keadilan bagi lingkungan hidup. Putusan hakim yang pro terhadap keadilan lingkungan hidup akan memberikan kontribusi besar terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, maka putusan hakim akan sangat strategis dalam upaya memberikan hak lingkungan hidup untuk tetap lestari dan terlindungi.

Seorang hakim yang memiliki kesadaran dan kompetensi yang baik dalam penguasaan hukum lingkungan tentu ketika dihadapkan dengan perkara di bidang lingkungan hidup akan memasukkan pertimbangan kepentingan lingkungan hidup. Ada dua aspek penting yang harus dipenuhi oleh hakim dalam melakukan tugasnya memutus perkara di bidang lingkungan hidup. Keadilan bagi pelaku termasuk apabila ada korban atas kepentingan yang dilanggar, sekaligus keadilan bagi lingkungan hidup. Pada konteks pelaksanaan tugas hakim dalam mengadili perkara di bidang lingkungan hidup, hakim dituntut melaksanakan penemuan hukum guna mendapatkan kebenaran.

Menemukan hukum dalam perkara konkret di bidang lingkungan hidup, mengandung pemahaman yang cukup kompleks. Penemuan hukum bukan semata-mata hanya penerapan peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, tetapi juga sekaligus penciptaan dan pembentukan hukum. Hakim selayaknya diberikan fungsi kemandirian dalam pembentukan hukum yang berupa putusan hakim. Idealnya bahwa hakim bukan sekedar corong dari undang-undang, tetapi pembentuk hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kepentingan hukum.

Putusan hakim terdiri dari kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, identitas para pihak atau terhukum, konsiderans atau pertimbangan tentang duduk perkara dan konsideran tentang hukumnya, serta diktum atau amar yang meliputi bagian yang disebut deklaratif dan dispositif. Di dalam perkara perdata lazimnya pertimbangan tentang duduk perkara diuraikan terpisah dari pertimbangan tentang hukumnya, sedangkan di dalam putusan pidana kedua pertimbangan tersebut menjadi satu.

Dalam bagian deklaratif dari amar diuraikan tentang hubungan hukum atau peristiwa hukumnya, sedangkan dalam bagian dispositif diuraikan tentang pokok putusannya.¹⁶

Berkaitan dengan putusan hakim ini memuat dua pengertian penting, yakni bahwa sebuah putusan hakim memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang disebutkan dalam putusan hakim. Pada konteks ini akan sangat terhubung dengan bagaimana rasa keadilan bagi para pihak yang harus ditunaikan oleh hakim melalui keputusannya. Artinya bahwa putusan hakim memiliki nilai strategis dalam perwujudan keadilan bagi para pihak tanpa terkecuali. Pemberian sanksi ataupun hukuman bagi pihak yang termuat dalam putusan hakim, harus mengedepankan pada keadilan bagi hak hukum dan kepentingan para pihak. Selanjutnya selain itu pada poin kedua dari pemahaman strategisnya putusan hakim adalah berkaitan dengan keberadaan putusan hakim sebagai pedoman bagi hakim lain dalam melakukan pembentukan hukum pada perkara yang serupa dengan yang diputus oleh putusan tersebut. Pada pemahaman ini, jelas tergambar bahwa sebuah putusan hakim yang mengedepankan pertimbangan keadilan bagi lingkungan hidup atas perkara di bidang lingkungan hidup akan memberikan pengaruh positif bagi putusan hakim lainnya yang berkenaan dengan perkara lingkungan hidup yang serupa.

Putusan dalam perkara lingkungan hidup yang dibuat oleh seorang hakim yang memiliki kesadaran, komitmen tinggi akan pentingnya kelestarian fungsi lingkungan hidup akan memberikan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan keadilan bagi para pihak dalam putusan, maupun pihak lain di luar putusan yang juga perlu diingat memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional yang dijamin dalam UUD RI Tahun 1945. Karena perbuatan melanggar dan melawan hukum di bidang lingkungan hidup bukan hanya persoalan keadilan bagi pelaku, namun juga keadilan bagi orang atau warga negara lain yang turut merasakan dampak atas perbuatan pelaku yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain tentunya dalam putusan hakim juga harus mempertimbangkan keadilan bagi lingkungan hidup untuk tetap lestari dan bisa dinikmati keberadaannya secara adil bagi seluruh masyarakat. Putusan hakim yang adil bagi manusia dan lingkungan hidup ini tentu tidak akan dihasilkan oleh hakim, apabila hakim tidak memiliki kesadaran, komitmen dan kompetensi dalam memahami pentingnya menempatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai hal yang wajib diperjuangkan. Oleh karena itu membekali hakim melalui sertifikasi hakim lingkungan hidup merupakan salah satu upaya yang

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 53.

1 dapat dilakukan untuk mewujudkan putusan hakim yang berkeadilan bagi manusia dan lingkungan hidup.

c. Efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia

Keberadaan hukum lingkungan sebagai sarana hukum untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan segala aspeknya berkembang dengan cukup pesat. Bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pembangunan dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Hukum lingkungan menyangkut penerapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Hukum lingkungan atau hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup secara umum dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.¹⁷

Keith Hawkins mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya, dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya. Block menyatakan bahwa *conciliatory style* adalah *remedial*, suatu metode *social repair and maintenance, assistance of people in trouble*, berkaitan dengan *what is necessary to ameliorate a bad situation*. Adapun *penal control prohibits with punishment* sifatnya *accusatory*, hasilnya *binary (all or nothing, punishment or nothing)*.¹⁸

Masih dalam konteks yang sama, Koesnadi Hardjosoemantri memberikan pengertian mengenai penegakan hukum sebagai kewajiban dari seluruh masyarakat, dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.¹⁹ Sementara menurut Siti Sundari Rangkuti²⁰, penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan

¹⁷ Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm., 1-2.

¹⁸ Sebagaimana dikutip Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 376.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 375.

²⁰ Siti Sundari Rangkuti, *op. cit.*, hlm. 208.

59 dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengarahannya dan penerapan sanksi administratif, keperdataan dan kepidanaan. Lebih lanjut Siti Sundari rangkuti²¹ mengemukakan penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Adapun penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana pada umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak meniadakan akibat pelanggaran hukum tersebut.

88 Dalam proses menegakkan hukum akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut meliputi lima hal, yakni: faktor hukumnya sendiri, faktor 58 penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²² Ali Budiardjo turut memberikan pendapatnya, sebagaimana dikutip Darwinsyah Minin²³, bahwa 24 terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum di pengadilan, yaitu inkonsistensi penerapan peraturan oleh aparat pengadilan dan kurangnya rasa hormat masyarakat kepada hukum. Selain dua faktor utama tersebut, hal lain yang turut mempengaruhi adalah adanya budaya hukum yang feodalis dan fasilitas pendukung yang kurang lengkap atau sudah tua.

Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor penegakan hukum tersebut, maka dapat diambil benang merah untuk menegaskan bahwa 103 penegakan hukum lingkungan sebagai bagian dari penegakan hukum juga sangat berkaitan dengan faktor-faktor tersebut. Apabila dikaitkan dengan pembahasan dalam tulisan ini, maka dapat disampaikan terdapat dua faktor yang sangat berkaitan, yakni faktor hukum atau substansi hukumnya, dan faktor aparat penegak hukum atau struktur hukumnya. Implementasi dua faktor tersebut sangat memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas penegakan hukum lingkungan. Penerapan substansi hukum oleh aparat hukum akan sangat terhubung erat dengan kemampuan dan

²¹ *Ibid.*, hlm. 209-210.

²² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 5

²³ Darwinsyah Minin, 2002, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Kesepakatan di Provinsi NAD", *Disertasi*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 115.

1

kompetensi yang dimiliki penegak hukum. Lebih lanjut bahwa substansi hukum dalam hal ini adalah aturan hukum positif yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara dari segi aparat penegak hukum, dapat dinyatakan bahwa hakim menjadi ujung tombak konkretisasi keadilan dalam norma hukum lingkungan yang berlaku. Keberadaan hakim dalam penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terjadi. Pengadilan merupakan lembaga penyelesaian sengketa lingkungan yang saat ini mengalami perkembangan cukup dinamis. Putusan hakim yang mengedepankan keadilan bagi manusia dan lingkungan hidup dipandang mampu memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditangani pengadilan menurut sifat perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan, sebagaimana yang diatur dalam hukum lingkungan. Masalah lingkungan hidup yang dapat dibawa ke ranah peradilan dan dimintakan putusan hakim adalah sengketa lingkungan yang dapat digolongkan menjadi sengketa di wilayah hukum administratif, perdata dan pidana. Dalam ketiga ranah tersebut tentu sangat terhubung dengan keberadaan hakim, baik di pengadilan tata usaha negara, maupun hakim di sengketa perdata dan pidana di tingkat pengadilan umum.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat kembali ditegaskan bahwa keberadaan UUPPLH sebagai *umbrella act* di bidang lingkungan hidup bukan tanpa arah dan tujuan. Artinya bahwa semua peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak diperkenankan untuk bertentangan dengan UUPPLH. Dalam upaya konkretisasi aturan hukum lingkungan, faktor hakim sebagai penegak hukum paling memiliki relevansi dengan fungsi peradilan. Di sinilah letak begitu pentingnya sumber daya manusia atau SDM hakim yang memiliki kesadaran, komitmen dan kompetensi di bidang hukum lingkungan, sehingga putusan yang dibuat hakim, selain akan mengedepankan keadilan manusia juga akan mengutamakan keadilan bagi lingkungan hidup. Karena sebuah putusan hakim yang pro keadilan manusia dan lingkungan hidup menunjukkan keberpihakan hakim sebagai representasi kekuasaan kehakiman yang memiliki keberpihakan pada *green constitution* dan *green legislation* di Indonesia.

d. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam keterpaduan prinsip trias politika

Keberadaan UUD RI Tahun 1945 sebagai *green constitution* mengandung suatu konsekuensi logis. Berstatus sebagai konstitusi negara, maka UUD RI Tahun 1945 diposisikan sebagai hukum dasar yang wajib ditaati semua elemen bangsa, terutama oleh konfigurasi ketiga jenis kekuasaan dalam Trias Politika yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Semua kekuasaan tersebut dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan pada ketentuan dalam konstitusi negara. Penetapan UUD RI Tahun 1945 sebagai *green constitution* wajib diikuti dengan komitmen dan upaya menghijaukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD RI Tahun 1945 atau dipahami sebagai *green legislation*. Pada konteks ini, sangat relevan dan penting adanya keterpaduan pelaksanaan ketiga konfigurasi kekuasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Lembaga legislatif dan eksekutif yang memiliki tugas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan wajib melaksanakan ketentuan untuk menghijaukan produk hukum yang dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Salah satunya produk hukum di bidang lingkungan hidup yang telah ditetapkan adalah UUPPLH sebagai *umbrella act* bagi pembentukan peraturan perundang-undangan sektoral di bidang lingkungan hidup. Sebagai hukum positif yang berlaku, maka kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman memberikan eksistensi penting dalam mekanisme penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

Pengaturan Pasal 1 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 tentang kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar menuntut adanya paradigma demokrasi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pada konteks tersebut juga menunjukkan dengan tegas bahwa kedaulatan rakyat dalam koridor demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Pemahaman sederhananya bahwa pelaksanaan demokrasi harus berbanding lurus dengan pelaksanaan hukum. Paradigma pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dibangun di atas pondasi demokrasi berdasarkan hukum berimplikasi pada keberadaan kelembagaan negara, model kekuasaan negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balance*, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. Oleh karenanya, paradigma supremasi parlemen menjadi prinsip supremasi hukum (negara, pemerintah dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum)

Prinsip supremasi hukum dapat diwujudkan salah satunya melalui adanya pilar penting berupa kekuasaan kehakiman, dalam hal ini lembaga peradilan yang independen dan berwibawa. Kehakiman (*judicial power*) sebagai kekuasaan yang mandiri dan berwibawa

1

20

73

20

77

20

20

76

diidealkan dapat menjalankan fungsinya, yakni: sebagai katup penekan untuk menekan tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan cara memberikan hukuman kepada siapapun dan pihak manapun yang melakukan pelanggaran yang bersifat inkonstitusional; sebagai senjata pamungkas untuk mencari dan menegakan kebenaran dan keadilan; sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat dengan mengedepankan hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia; sebagai wali masyarakat, tempat perlindungan dan pemulihan keadaan semula bagi masyarakat yang merasa dirugikan kepentingannya; serta putusan pengadilan seperti putusan Tuhan, sebagai konsekuensi dari prinsip bebas dan mandiri yang diberikan konstitusi dan UU pada lembaga peradilan dan hakim.²⁴ Persoalan kekuasaan kehakiman menjadi aspek penting dalam menempat pengujian kewibawaan hukum. Selain bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu lembaga kekuasaan negara sebagai perwujudan paham negara hukum yang berdasarkan atas konstitusi.²⁵

Pada konteks pelaksanaan kekuasaan yudikatif, keberadaan lembaga peradilan menjadi ujung tombak dalam mewujudkan keadilan, terutama terkait bagaimana seorang hakim memenuhi rasa keadilan atas perkara yang diamanahkan untuk diberikan putusan. Dikaitkan dengan perkara pelanggaran atau perbuatan melawan hukum di ranah lingkungan hidup, maka seorang hakim dalam memberikan putusannya selain mempertimbangkan keadilan bagi manusia juga wajib memperhatikan pemenuhan rasa keadilan bagi lingkungan hidup. Putusan pengadilan yang pro keadilan lingkungan hidup akan dihasilkan oleh seorang hakim yang memiliki kompetensi dan kesadaran pentingnya memperjuangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Uraian tersebut menunjukkan gambaran begitu pentingnya hakim dalam lembaga peradilan di bawah kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Representasi putusan hakim yang bermuatan keadilan manusia dan lingkungan hidup akan memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang secara tidak langsung juga memberikan pengaruh terhadap implementasi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Semua konfigurasi kekuasaan dari mulai legislatif, eksekutif dan yudikatif turut adil dalam perwujudan *green legislation* di Indonesia. Oleh karenanya menjadi penting memberikan penguatan kesadaran, pemahaman dan kompetensi

24 Zainal Arifin Hoesein, 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Setara Press, Malang, hlm. 2-3.

25 *Ibid.*, hlm. 3.

bagi hakim melalui sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam rangka upaya mewujudkan *green legislation* di Indonesia.

2. Penerapan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dalam Upaya Mewujudkan Konsep *Green Legislation* di Indonesia

⁷ Dalam menghadapi sengketa lingkungan, masyarakat terus mencari jalan keluar melalui berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan dalam rangka memperjuangkan keadilan masyarakat dan keadilan lingkungan.²⁶ Ketika masalah lingkungan, terutama pencemaran telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan moral. Namun demikian, juga layak untuk dikenakan sanksi pidana dan membutuhkan penyelesaian yang tidak sekedar penguatan aspek legislasi namun juga penguatan sistem litigasi dalam penanganan sengketa lingkungan hidup.³⁷ ³⁷ Persoalan struktural terkait masalah lingkungan seperti masalah kebijakan, penegakan hukum, dominasi korporasi dalam penguasaan lahan dan berkurangnya tutupan hutan sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah penyelesaian secara sistematis dan kuat. Pemecahan terhadap akar permasalahan dan solusi langkah yang serta merta harus diambil seakan berselaras dengan adagium yang menyatakan bahwa, “Apabila hukum tak lagi dapat dikontrol dari ranah substantifnya, maka ia harus dikontrol dari ranah strukturalnya.” Motivasi agar hukum menjadi sebuah tatanan yang menjaga keseimbangan antara aspek keadilan dan juga kepastian dalam kontrol melalui ranah strukturalnya. Penerapan sertifikasi hakim lingkungan hidup secara maksimal dalam rangka mewujudkan konsep *green legislation* di Indonesia merupakan sebuah urgensi dalam peningkatan penegakan hukum itu sendiri.

⁴ Persoalan penegakan hukum lingkungan terkait dengan pemberdayaan penegakan hukum lingkungan meliputi pengembangan sistem satu atap (*one roof enforcement system*) dan pola *greening the bench* untuk membuat peradilan yang lebih mumpuni di bidang lingkungan. Dalam hal sistem pemberdayaan satu atap, PPNS, polisi, dan kejaksaan terpilih berada dalam satu atap Kementerian Lingkungan Hidup, dan instansi pengelolaan lingkungan hidup di daerah. PPNS dan polisi terpilih sebagai penyidik khusus bekerja sama dengan jaksa khusus lingkungan untuk menargetkan kasus lingkungan tertentu yang layak dibawa ke pengadilan. Untuk itu diperlukan hakim bersertifikat hukum lingkungan untuk menangani

²⁶ Absori, Khuzaefah Dimiyati dan Kelik Wardiono, “Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif,” *Jurnal Mimbar Hukum, Op. Cit.*, hlm. 367

1

4 kasus lingkungan. Di samping itu, bisa saja diangkat hakim khusus dari kalangan ahli atau pakar lingkungan.²⁷ Sehubungan dengan ini, maka telah keluar Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan sebagai tonggak pembangunan sistem sertifikasi hakim lingkungan dalam menangani perkara pidana, perdata dan tata usaha negara di bidang lingkungan hidup. Hingga saat ini, MA telah memiliki 210 lebih hakim bersertifikat lingkungan dengan dilaksanakannya pelatihan dan pembinaan setiap tahun. Namun untuk dibentuknya pengadilan khusus lingkungan hidup belum ada kesinergian bersama antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, bersama dengan legislatif atau DPR dan juga lembaga yudikatif MA dalam menindaklanjuti pembentukan pengadilan khusus ini ke tahap tataran yang lebih serius.

5

Sehingga dalam konteks menjalankan hukum lingkungan di tengah masyarakat yang penuh dengan kompleksitas, dibutuhkan aparat penegak hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim yang mempunyai visi, komitmen yang kuat, dan pengetahuan yang memadai di bidang lingkungan. Upaya dalam mewujudkan pengadilan khusus di bidang lingkungan sudah berusaha dilakukan, tetapi tidak dengan cara membentuk pengadilan *ad hoc*, sebagaimana pengadilan HAM. Mengingat selama ini hakim *ad hoc* yang telah melepaskan jabatannya sebagai hakim karier dan diangkat dengan menjadi hakim *ad hoc* dengan Keputusan Presiden, ternyata kesejahteraan dan kariernya berada dalam ketidakpastian. Kondisi seperti ini dikhawatirkan juga akan mempengaruhi kesungguhan hakim *ad hoc* dalam menjalankan tugasnya.²⁸

13

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebenarnya dapat melakukan langkah-langkah terobosan dalam upaya melakukan pencegahan ataupun penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan. Beberapa di antaranya KLH dapat melakukan kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menyamakan persepsi, pemahaman, dan langkah dalam rangka melakukan penegakan hukum lingkungan dengan membentuk kerjasama penegakan hukum lingkungan dengan manajemen satu atap yang ditempatkan di KLH. Lebih maju lagi, Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan ICEL, dan Mahkamah Agung telah melakukan pembinaan aparat penegak hukum, meliputi polisi, jaksa, dan hakim yang dikenal dengan “formula 12”. Pembinaan melalui formula 12

²⁷ Absori, *Op.Cit.*, hlm. 226

²⁸ Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, (Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 177

pada awalnya hanya membina 12 aparat penegakan hukum, belakangan sudah berkembang mencapai 750 lebih. Mereka yang telah dibina kemudian ditugaskan di lingkungan pengadilan umum dan pengadilan khusus lingkungan ataupun pengadilan *ad hoc* lingkungan dengan harapan akan dapat menjalankan hukum lingkungan dengan lebih baik ketika ditugaskan dalam menangani sengketa lingkungan.²⁹

Dalam penerapan sertifikasi hakim lingkungan hidup ke depan dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sangat penting untuk melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim. Sehingga yang menjadi tolok ukur dalam pengawasan perilaku hakim adalah kode etik dan pedoman perilaku hakim itu sendiri. Kode etik dan pedoman perilaku hakim telah lama ada dan dimiliki oleh hakim Indonesia. Secara formal, kongres yang kemudian disebut dengan munas dalam organisasi hakim, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), dan juga Rapat Kerja Mahkamah Agung telah membentuk dan kemudian menyempurnakannya, yaitu Konggres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, Munas IKAHI tahun 2000 di Bandung, dan kemudian Rapat Kerja Mahkamah Agung tahun 2002 di Surabaya telah merumuskan 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kesepuluh prinsip tersebut dirumuskan setelah membandingkan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional maupun yang berlaku di beberapa negara, termasuk di dalamnya adalah *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*.³⁰

Hakim berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya tidak lain adalah pemangku jabatan yang terhormat (*nobile officium*). Oleh sebab itu, merupakan sebuah keharusan apabila dalam proses rekrutmen sumber daya manusia dilengkapi dengan sederetan prosedur seleksi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta pendidikan dan pelatihan prajabatan (*pre service training*) agar dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas yang baik. Hal ini akan memiliki dampak pada kualifikasi penyandang jabatan hakim ke depan.

Hakim sebagai sumber daya manusia merupakan *the main actor* yang menjalankan institusi cabang kekuasaan kehakiman yakni pengadilan memegang peranan penting sebagai pelaksana fungsi pengadilan yang mempunyai karakter independen dan merdeka yang merupakan turunan atau derivasi dari karakter kekuasaan kehakiman itu sendiri. Sebagai perimbangan karakter dan moralitas hakim yang independen dan tidak dapat dipengaruhi

²⁹ *Ibid.*, hlm. 177-178

³⁰ Ahmad Fadlil Sumadi, 2013, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Jawa Timur: Setara Press, hlm. 218

1

50

siapapun, hakim haruslah memiliki tanggung jawab baik horisontal kepada manusia dan juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh hakim dalam kinerjanya, mendapat pengaruh kuat dari faktor keahlian profesionalitas dan faktor moralitas. Dimana faktor moralitas inilah yang harus memperoleh pertimbangan dan atensi yang lebih, hal ini disebabkan karena keahlian profesional saja seringkali bertentangan dengan perkembangan dan implementasinya dalam dunia praktis dimana dalam kenyataannya aspek moralitas tidak demikian selalu berbanding lurus dengan skill wawasan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, dalam perspektif demikian pengawasan terhadap hakim mendapatkan posisi yang begitu urgen dalam menilai kinerja hakim ke depannya.³¹

3

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara yang tertinggi dalam lingkup pengadilan yang berada di bawahnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung juga sekaligus sebagai pengawas tertinggi dalam lingkup pengadilan yang berada di bawahnya. Secara sederhana dalam struktur ketatanegaraan, dalam aspek pengawasan terhadap moralitas hakim sebagai unsur kedua dari profesionalisme, terdapat dua institusi pengawas, Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal.⁴³³²

Dalam pelatihan dan pembinaan sertifikasi hakim lingkungan hidup dalam kenyataannya, jumlah kuantitas hakim yang telah menandatangani sertifikasi lingkungan hidup itu sendiri masih minim. Hal ini melebarkan jurang ketidakpuasan masyarakat atas lemahnya penegakan hukum terhadap keputusan pengadilan yang bersinggungan langsung dengan sengketa atau kasus lingkungan hidup. Dari sekitar 8000 hakim, hanya terdapat 413 hakim yang sudah menandatangani sertifikasi lingkungan hidup atau setara dengan 5 persen dari jumlah kuantitas hakim yang ada.

12

Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Takdir Rahmadi mengungkapkan bahwa sertifikasi hakim lingkungan hidup merupakan sebuah hal mutlak yang harus terus dijalankan dan diupayakan dalam rangka memberikan respon yang positif dari kritik masyarakat selama ini atas penegakan hukum terhadap berbagai sengketa lingkungan hidup yang terjadi. Beliau menjelaskan dalam pelatihan dan sertifikasi hakim lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tahun 2016 bertempat di Bogor bahwa hakim pengadilan lingkungan hidup dalam

³¹ *Ibid.*, hlm. 216

³² *Ibid.*, hlm. 217

kinerjanya harus memiliki konsep *green legislation* sebagai implementasi dan bentuk realisasi dari tanggung jawab negara dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang didasarkan pada prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sehingga dalam pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup harus senantiasa berlandaskan pada paradigma pengadilan sebagai bagian dari instrument penegakan hukum yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat memenuhi rasa keadilan baik keadilan substansial dan prosedural. Begitu pun juga dengan sengketa lingkungan hidup yang bermunculan akibat masih lemahnya baik substansi hukum, struktur hukum dan juga kultur dalam hukum lingkungan. Salah satu faktornya adalah ditandai dengan masih banyaknya regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang multitafsir. Beliau menjelaskan bahwa lemahnya struktur hukum dapat dinilai dengan tumbuhnya regulasi dalam bentuk kebijakan yang terindikasi pro terhadap investasi tetapi di sisi lain mengesampingkan perlindungan terhadap lingkungan hidup, hal ini dilandasi karena masih runcingnya perbedaan sudut pandang yang dimiliki antara pembuat kebijakan, pemangku kepentingan dan juga aparat penegak hukum yang ada.

Dalam perkembangan penerapan sertifikasi hakim lingkungan hidup ke depan, Mahkamah Agung bekerja sama dengan UNDP (United Nations Development Programme) dimana partisipasi UNDP dibutuhkan khususnya dalam program pembekalan dan sertifikasi hakim lingkungan hidup disebabkan karena kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari harian Kompas, hingga pada tahun 2015 Mahkamah Agung baru melaksanakan pelatihan terhadap sertifikasi hakim lingkungan hidup yang dijalankan terhadap 329 hakim. Jumlah tersebut terdiri atas rincian sebanyak 251 hakim peradilan umum dan 78 hakim peradilan tata usaha negara. Sedangkan pada tahun 2016, melalui kerja sama bersama UNDP, Mahkamah Agung akan melaksanakan sertifikasi terhadap 240 hakim.³³

Lebih lanjut dalam pengawalan kebijakan sertifikasi lingkungan hidup yang dijalankan pada tahun 2020, telah dibuka kembali pembukaan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup angkatan X yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI. Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), Dr. H.M Syarifuddin,SH.,MH, didampingi Wakil Ketua

³³ Kompas.com, 28 Juli 2016, "Mahkamah Agung Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup," Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020

1

14
14
101
14
14

Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan MA, Ketua Kamar Perdata MA, Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA, serta Kepala Biro Hukum dan Humas MA, membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum, Militer dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia tahun 2020 bertempat di Command Center Mahkamah Agung pada bulan Agustus 2020 lalu.

Menyesuaikan dengan kondisi pada era covid-19 dimana tidak memungkinkan untuk dilakukan penyelenggaraan yang bersifat *offline*, sehingga pembukaan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup untuk angkatan kesepuluh ini diselenggarakan dengan memanfaatkan mekanisme metode pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sistem *e-learning* dimana kegiatannya dilangsungkan mulai tanggal 10 Agustus hingga 11 September 2020. Pembukaan pelatihan sertifikasi hakim LH ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan terhadap kebijakan yang merupakan implementasi dari Keputusan KMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Selain itu, dalam rangka untuk menghadapi peningkatan eksploitasi SDA yang berdampak pada sengketa kebakaran hutan dan juga eksploitasi di ranah pertambangan yang meningkat di Indonesia, dengan harapan bahwa hakim dapat meningkatkan kapabilitas pengetahuan dan wawasannya pasca pelaksanaan diklat sehingga dapat menjaga ruh dan marwah keadilan itu sendiri. Keahlian hakim dalam memutus perkara berdasarkan pengalaman kasus-kasus sebelumnya juga harus dijadikan sebagai sarana guna mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks.³⁴ Selain itu, pada tanggal 6 November 2020, Mahkamah Agung RI Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan juga terus mengupayakan pelatihan terkait sertifikasi hakim lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pemanggilan peserta untuk mengikuti pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup bagi Hakim Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia dengan melakukan kerja sama intensif bersama ICEL dan LeIP.

8
90
33

Berdasarkan Keputusan KMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, yang dimaksud sebagai sertifikasi hakim lingkungan hidup disebut dalam Pasal 1 angka 1, diartikan sebagai pemberian sertifikat dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas menjadi hakim

³⁴ Mahkamahagung.go.id, Senin, 10 Agustus 2020, "Pembukaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan X," Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020

lingkungan hidup oleh Ketua Mahkamah Agung. Dimana dinyatakan dalam angka 2 selanjutnya, bahwa hakim lingkungan hidup didefinisikan sebagai hakim yang telah bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung. Tahapan-tahapan dalam memperoleh sertifikasi hakim lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 4, dengan melalui tahapan-tahapan antara lain: tahapan seleksi, pengangkatan dan penempatan, pengawasan dan evaluasi, insentif dan disinsentif, dan pendanaan. Dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup, dimana dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa hakim lingkungan hidup yang berada dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara berwenang mengadili perkara lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Hakim lingkungan hidup berhak diangkat dengan SK KMA setelah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan kompetensi, mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus oleh Tim seleksi. Tahapan penyelenggaraan seleksi hakim lingkungan hidup yang harus ditempuh ditetapkan dengan sebelumnya menentukan kebutuhan jumlah hakim, pendaftaran, dan proses seleksi peserta pelatihan yang terdiri dari seleksi administrative, seleksi kompetensi, dan seleksi integritas, diakhiri dengan proses diklat atau pelatihan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 Keputusan KMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

3. Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dalam Upaya Mewujudkan Konsep *Green Legislation* Di Indonesia

Mencermati realitas yang terjadi, dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum lingkungan maupun penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia masih lemah dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Faktor masih lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia secara garis besar dimulai dari substansi hukum yang masih menimbulkan tafsir yang berlainan dalam regulasi perundang-undangan, struktur hukum atau faktor aparat penegak hukum khususnya hakim yang masih setengah hati dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di pengadilan, serta kultur hukum atau budaya hukum yang masih banyak diwarnai dengan permainan kasus dalam proses peradilan di Indonesia. Hal ini menjadi indikasi dan tolok ukur bahwa sebaik apapun pembenahan yang dilakukan terhadap struktur hukum atau aparat penegak hukum tidak mampu memberikan hasil yang maksimal tanpa adanya upaya dan usaha terhadap pembenahan substansi hukum itu sendiri. Produk peraturan perundang-undangan yang sudah sedemikian hijau dalam

1

meningkatkan penegakan hukum lingkungan di Indonesia sudah seharusnya dijalankan melalui berbagai peraturan perundang-undangan turunan dalam mengawal konsep *green legislation* di Indonesia.

2

Konsep *green legislation* berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2009, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di pusat maupun daerah selain harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011¹⁹ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (terakhir telah diundangkan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)² dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 harus pula memenuhi asas-asas sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu prinsip atau asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.

75

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup² mengamanatkan penguatan kebijakan lingkungan (*green policy*) ke dalam setiap peraturan perundang-undangan yang tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetapi juga terhadap semua peraturan perundang-undangan. Penguatan kebijakan lingkungan (*green policy*) ke dalam setiap peraturan perundang-undangan biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *green legislation*, atau dapat diterjemahkan dengan peraturan perundang-undangan hijau. Peraturan Perundang-undangan hijau (*green legislation*) berdasarkan Pasal 44 UU Nomor 32 Tahun 2009 wajib memperhatikan 2 (dua) hal yaitu (1)

perlindungan fungsi lingkungan hidup dan (2) prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah dijelaskan di atas.³⁵

Pasca dikeluarkannya Keputusan KMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, merupakan bentuk keseriusan langkah pemerintah dalam merespon *green policy* dengan mengacu pada *green legislation* yang telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan berlandaskan pada *green constitution* yang telah diamanatkan melalui Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam hal demikian, dapat dikatakan bahwa peranan konstitusi adalah sebagai “langit” yang merupakan titik tertinggi piramida aturan bernegara dari segala aturan hukum yang berlaku. Begitu pun dengan juristokrasi (*juristocracy*), yang berdasarkan konsep Ran Hirschl dinyatakan bahwa proses mekanisme dalam mengambil keputusan merupakan hal yang sangat urgen dilakukan para hakim di pengadilan sehingga dapat berpengaruh terhadap alur kebijakan negara dan roda pemerintahan berjalan.³⁶

Pengawasan terhadap kebijakan sertifikasi lingkungan hidup kemudian tidak berhenti sampai disitu saja namun ditindaklanjuti Mahkamah Agung dengan menerbitkan aturan-aturan internal lainnya, salah satunya adalah penerbitan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang menjalankan proses pemantauan dan evaluasi baik secara rutin maupun berkala terhadap sertifikasi hakim lingkungan hidup yang sudah berjalan. Pelaksanaan proses pemantauan dan evaluasi ini dijalankan oleh Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional yang bekerja sama dengan Balitbang Diklat Kumdil MA RI, serta juga dengan melakukan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehingga arah pembangunan hukum ke depan dalam penegakan hukum lingkungan yang diwujudkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dengan berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan

³⁵ Eko Nurmardiansyah, “Konsep Hijau: Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* dalam Rangka *Eco-Democracy*,” *Jurnal Veritas Et Justitia*, Vol.1, No.1, (2015), hlm. 208.

³⁶ Pan Mohamad Faiz, “Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, (Desember, 2016), hlm. 778

1

green legislation di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain: *pertama*, pengawalan kebijakan sertifikasi hakim lingkungan hidup dengan melakukan kerja sama antara Mahkamah Agung, ICEL, UNDP, dan pihak-pihak terkait dalam bentuk terus menjalankan pelatihan dan diklat-diklat serta mengupayakan dilakukannya evaluasi dan pemantauan sebagai wujud dari pengawasan, *kedua*, menambah kapabilitas hakim dalam bidang keilmuan lingkungan hidup dalam memutus perkara lingkungan, serta penguatan paradigm berpikir yang pro-lingkungan atau pro-natura (*green thinking*) sebagai bentuk perwujudan implementasi dari ⁷³ norma-norma lingkungan yang ada dalam *the living constitution* UUD 1945.

50

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan poin-poin sebagai berikut:

1. Sertifikasi hakim lingkungan hidup penting dilakukan dalam upaya penerapan *green legislation* di Indonesia didasarkan pada empat pertimbangan, yaitu: dalam rangka perwujudan UUD RI Tahun 1945 sebagai *green constitution*, putusan hakim memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan manusia dan lingkungan hidup, berkontribusi bagi efektivitas penegakan hukum lingkungan, serta pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam keterpaduan dengan prinsip trias politika.
2. Langkah serius pemerintah dalam meningkatkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagai wujud upaya implementasi *green legislation* di Indonesia dilakukan dengan menerbitkan ⁹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan sebagai tonggak atau pondasi pembangunan sistem sertifikasi hakim lingkungan dalam menangani perkara pidana, perdata dan tata usaha negara di bidang lingkungan hidup. Pelatihan dan pembinaan hakim terus diupayakan setiap tahunnya sehingga kuantitas jumlah hakim lingkungan hidup yang telah bersertifikasi dapat memenuhi kebutuhan hakim di setiap wilayah.
3. Arah pembangunan hukum ke depan dalam penegakan hukum lingkungan yang diwujudkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dengan berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan *green legislation* di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa langkah

antara lain: pertama, pengawalan kebijakan sertifikasi hakim lingkungan hidup dengan melakukan kerja sama antara Mahkamah Agung, ICEL, UNDP, dan pihak-pihak terkait dalam bentuk terus menjalankan pelatihan dan diklat-diklat serta mengupayakan dilakukannya evaluasi dan pemantauan sebagai wujud dari pengawasan, kedua, menambah kapabilitas hakim dalam bidang keilmuan lingkungan hidup dalam memutus perkara lingkungan, serta penguatan paradigm berpikir yang pro-lingkungan atau pro-natura (*green thinking*) sebagai bentuk perwujudan implementasi dari norma-norma lingkungan yang ada dalam *the living constitution* UUD Negara RI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Absori, Khuzaefah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, "Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 2, hlm. 193-410
- Absori, 2009, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, (Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Ahmad Fadlil Sumadi, 2013, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Jawa Timur: Setara Press.
- Darwinsyah Minin, 2002, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan Kesepakatan di Provinsi NAD", *Disertasi*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Eko Nurmardiansyah, 2015, "Konsep Hijau: Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* dalam Rangka *Eco-Democracy*," *Jurnal Veritas Et Justitia*, Vol.1, No.1, hlm. 183-219
- Firman Floranta Adonara, 2015, "Prinsip kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2, hlm. 218-236
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Press, Jakarta.
- K. C. Wheare, 2019, *Konstitusi-konstitusi Modern*, Nusa Media, Bandung.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nadjamuddin Ramly, 2007, *Islam Ramah Lingkungan, Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, pemeliharaan, dan Penyelamatan Lingkungan Hidup*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta Selatan
- Pan Mohamad Faiz, 2016, "Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, hlm. 767-787
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Sony Keraf, 2006, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta.

- Sudikno Mertokusuko, 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum*, Penerbit Liberty.
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Titon Slamet Kurnia, 2012, *Konstitusi HAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- 48 Zainal Arifin Hoesein, 2016, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*, Setara Press, Malang.

Koran

- Kompas.com, 28 Juli 2016, "Mahkamah Agung Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup," Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020
- Mahkamahagung.go.id, Senin, 10 Agustus 2020, "Pembukaan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan X," Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020

Peraturan Perundang-Undangan

- 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 47 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.
- 86 Keputusan KMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

12745

ORIGINALITY REPORT

40%

SIMILARITY INDEX

36%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Hoa Sen University Student Paper	4%
2	journal.unpar.ac.id Internet Source	3%
3	media.neliti.com Internet Source	2%
4	iskandarmoerad.blogspot.com Internet Source	2%
5	repository.unika.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%
7	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
8	blh.kotawaringinbaratkab.go.id Internet Source	1%
9	ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	1%

10	ejournal.umm.ac.id Internet Source	1%
11	www.scribd.com Internet Source	1%
12	regional.kompas.com Internet Source	1%
13	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source	1%
14	www.ptun-tanjungpinang.go.id Internet Source	1%
15	asulhoesein.blogspot.com Internet Source	1%
16	www.pn-depok.go.id Internet Source	1%
17	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
18	dokumen.tips Internet Source	<1%
19	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
20	stpengataadvocates.blogspot.com Internet Source	<1%
21	dkpp.go.id Internet Source	<1%

22	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
23	Submitted to Binus University International Student Paper	<1%
24	id.123dok.com Internet Source	<1%
25	e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1%
26	www.iswahyudi-wahyu.top Internet Source	<1%
27	ojs.umrah.ac.id Internet Source	<1%
28	de.scribd.com Internet Source	<1%
29	oemarbeksam.blogspot.com Internet Source	<1%
30	supriadi-uniba.blogspot.com Internet Source	<1%
31	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
32	mykonlinedotblist.wordpress.com Internet Source	<1%

33	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1%
34	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
35	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	<1%
36	anzdoc.com Internet Source	<1%
37	www.beritamandiri.co Internet Source	<1%
38	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1%
39	www.yumpu.com Internet Source	<1%
40	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
41	conf.fakhukum.untagsmg.ac.id Internet Source	<1%
42	theglobal-review.com Internet Source	<1%
43	id.scribd.com Internet Source	<1%
44	mkri.id Internet Source	<1%

<1%

45

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1%

46

www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id

Internet Source

<1%

47

ptun-jakarta.go.id

Internet Source

<1%

48

Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Student Paper

<1%

49

pn-sumber.go.id

Internet Source

<1%

50

zombiedoc.com

Internet Source

<1%

51

dspace.uui.ac.id

Internet Source

<1%

52

mafiadoc.com

Internet Source

<1%

53

repository.unej.ac.id

Internet Source

<1%

54

repository.unand.ac.id

Internet Source

<1%

55

indonesaya.wordpress.com

Internet Source

<1%

56 segarailalang.blogspot.com Internet Source <1%

57 lingkarhayati.wordpress.com Internet Source <1%

58 eprints.umm.ac.id Internet Source <1%

59 yudosaputra91.blogspot.com Internet Source <1%

60 kotijah.blogspot.com Internet Source <1%

61 lammarasi-sihaloho.blogspot.com Internet Source <1%

62 e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source <1%

63 www.atlantis-press.com Internet Source <1%

64 astanwr.blogspot.com Internet Source <1%

65 bldk.mahkamahagung.go.id Internet Source <1%

66 Submitted to Sriwijaya University Student Paper <1%

67 tomabessa.blogspot.com

Internet Source

<1%

68

blog-sribangun.blogspot.com

Internet Source

<1%

69

lerymboeik.blogspot.com

Internet Source

<1%

70

hennylukiastuti24.wordpress.com

Internet Source

<1%

71

www.pa-biak.go.id

Internet Source

<1%

72

gemalawastainpkl.blogspot.com

Internet Source

<1%

73

doku.pub

Internet Source

<1%

74

repo.unand.ac.id

Internet Source

<1%

75

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1%

76

www.kompasiana.com

Internet Source

<1%

77

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

<1%

78

abstrak.ta.uns.ac.id

Internet Source

<1%

79	pandaihukum.blogspot.com Internet Source	<1%
80	adoc.tips Internet Source	<1%
81	www.ememha.com Internet Source	<1%
82	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
83	ojs.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1%
84	Heniyatun Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, Puji Sulistyaningsih. "Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan", <i>Varia Justicia</i> , 2018 Publication	<1%
85	jurnal.untidar.ac.id Internet Source	<1%
86	jdih.ptun-mataram.go.id Internet Source	<1%
87	journal.uniku.ac.id Internet Source	<1%
88	ana-hidayati.blogspot.com Internet Source	<1%

89	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
90	es.scribd.com Internet Source	<1%
91	randi-pradipta.blogspot.com Internet Source	<1%
92	dedearytarmidi.blogspot.com Internet Source	<1%
93	alviprofdr.blogspot.com Internet Source	<1%
94	pttun-jakarta.go.id Internet Source	<1%
95	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
96	lbh-semarang.or.id Internet Source	<1%
97	123dok.com Internet Source	<1%
98	Said Sampara. "FUNGSI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN YANG IMPARSIAL", <i>Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum</i> , 2017 Publication	<1%

99 Yuliyanto Yuliyanto. "Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2018
Publication <1%

100 archive.org
Internet Source <1%

101 www.jurnalhukumdanperadilan.org
Internet Source <1%

102 www.marketing.co.id
Internet Source <1%

103 repository.unhas.ac.id
Internet Source <1%

104 fr.scribd.com
Internet Source <1%

105 works.bepress.com
Internet Source <1%

106 ojs.uninus.ac.id
Internet Source <1%

107 icime.usu.ac.id
Internet Source <1%

108 www.iiste.org
Internet Source <1%

repository.ubaya.ac.id

109

Internet Source

<1%

110

rajawaligarudapancasila.blogspot.com

Internet Source

<1%

111

republicia.blogspot.com

Internet Source

<1%

112

www.lawyersclubs.com

Internet Source

<1%

113

Rayhan Dudayev. "TINDAKAN AFIRMATIF SEBAGAI BENTUK KEADILAN PADA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI LAUT : STUDI KASUS MV HAI FA DAN NELAYAN UJUNG KULON", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2020

Publication

<1%

114

islamicmarkets.com

Internet Source

<1%

115

Atika Thahira. "Perkembangan Negara Hukum Demokrasi Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia", Jurnal Selat, 2020

Publication

<1%

Exclude bibliography On

12745

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29